

**PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH NEGARA
UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI
PERTANAHAN DI INDONESIA**

DISERTASI

Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Derajat Doktor



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021**

ABSTRAK

Regulasi penguasaan tanah negara mengandung tiga masalah pokok, *pertama*: terjadinya sektoralisasi penguasaan tanah negara, *kedua*: adanya perbedaan pengaturan pendaftaran tanah antara rezim agraria dan rezim akuntansi negara. dan *ketiga*: masih minimnya regulasi pendaftaran tanah negara, dibanding pendaftaran tanah lainnya. Semua permasalahan ini dirasakan menghambat upaya untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan cara mengkaji, menganalisis norma hukum mengenai pendaftaran tanah negara dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan. Rumusan masalah yang diajukan antara lain : a) Bagaimana pengaturan pendaftaran tanah negara yang berasal dari pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan? b). Bagaimanakah pengaturan pendaftaran tanah negara yang berasal dari penertiban tanah terlantar dan tanah negara bekas tanah hak yang sudah berakhir dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan ? c). Bagaimana pengaturan pendaftaran tanah negara lainnya, seperti tanah negara kawasan hutan dan kawasan tertentu termasuk kawasan sempadan pantai, danau, sungai dan pulau-pulau kecil dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan?. Hasil penelitian disertasi ini, dapat disimpulkan : *pertama*, pengaturan pendaftaran tanah negara hasil pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum masih belum memadai dan tidak konsisten antar rezim hukum. Hal ini terlihat disaat sebelum dan sesudah lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2012 mengenai kewajiban mendaftarkan tanah negara hasil pengadaan tanah tersebut. Selain itu, terdapat pula perbedaan pengaturan pendaftaran tanah Negara, dari sisi hukum agraria terdapat dikotomi pendaftaran tanah antara *public domein* dan *privat domein*, sementara dari sisi hukum akuntansi justru sebaliknya. *Kedua*, pengaturan pendaftaran tanah negara yang berasal dari penertiban tanah terlantar dan tanah negara bekas tanah hak yang sudah berakhir, belum dapat diterapkan secara optimal, karena belum jelasnya konsep operasional mengenai “*dengan sengaja tidak dipergunakan oleh pemegang haknya*” dan “*sepanjang bangunan, tanaman dan benda-benda di atasnya masih diperlukan*” . Padahal indikator-indikator ini sangat menentukan dalam hal pemutusan hubungan hukum keperdataan kepada bekas pemegang hak, apakah harus diberikan ganti rugi atau tidak. *Ketiga*, pengaturan pendaftaran tanah negara lainnya, meliputi kawasan hutan dan kawasan tertentu, kawasan sempadan pantai, danau, sungai, pulau-pulau kecil, melibatkan berbagai rezim hukum yang masih disharmoni, sehingga diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pertanahan.

Kata kunci : Pendaftaran Tanah, Tanah Negara, Tertib Administrasi Pertanahan.

ABSTRACT

The regulation of state land tenure contains three main problems, *first*: the sectoralization of state land tenure, *second*: the difference in land registration arrangements between the agrarian regime and the state accounting regime. and *third*: the lack of regulation on state land registration, compared to other land registrations. All of these problems are felt to hinder efforts to realize orderly land administration. The method used in this research is normative juridical, by reviewing, analyzing legal norms regarding state land registration in realizing orderly land administration. The formulation of the problems proposed include: a) How is the regulation of state land registration originating from land acquisition for development for the public interest in realizing orderly land administration? b). How is the regulation of state land registration originating from controlling abandoned land and near land ex-titles that have ended in realizing orderly land administration? c). How are other arrangements for state land registration, such as state land in forest areas and certain areas including coastal border areas, lakes, rivers and small islands in realizing orderly land administration? The results of this dissertation research can be concluded: *first*, the regulation of state land registration resulting from land acquisition for development of public interest is still inadequate and inconsistent between legal regimes. This can be seen before and after the enactment of Law Number 2 of 2012 concerning the obligation to register state land resulting from the land acquisition. Other than that, There are also differences in the regulation of state land registration, in terms of agrarian law there is a dichotomy of land registration between *the public domain* and *the private domain*, while in terms of accounting law it is the opposite. *Second*, the regulation of state land registration originating from the control of abandoned land and state lands that have expired, cannot be applied optimally, because the operational concept of "*deliberately not being used by the right holder*" and "*as long as buildings, plants and the things on it are still needed*". In fact, these indicators are very decisive in terms of terminating civil law relations with former rights holders, whether or not compensation should be given. Third, other arrangements for state land registration, including forest areas and certain areas, coastal border areas, lakes, rivers, small islands, involve various legal regimes that are still disharmony, so that further regulation is needed in order to realize land administration.

Keywords : *Land Registration, State Land, Orderly Land Administration.*